



Merdeka dari Sampah ?

ALHAMDULILLAH kita telah merayakan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79. Berbagai kemeriahan diwujudkan untuk menyambut hari kemerdekaan bangsa ini. Bulan Agustus ini penuh dengan aneka kegiatan untuk memperingatinya. Kita pun merasakan arti kemerdekaan dengan terbebas dari penjajahan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan menentukan arah pembangunan tanpa campur tangan penjajah. Namun demikian, ada satu pertanyaan menggelitik, apakah kita sudah merdeka dari sampah?

Kalau melihat realitas yang ada dan apa yang dirasakan masyarakat, nampaknya kita belum merdeka sepenuhnya dengan masalah sampah. Kita melihat persoalan sampah ini menjadi momok di setiap kota besar di Indonesia, termasuk di Yogya dan sekitarnya di mana merasakan dalam beberapa bulan terakhir bagaimana sampah berserakan di mana-mana karena kesulitan membuang. Hal ini dikarenakan ditutupnya tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah Piyungan. Sementara di sisi hulu dan tengah belum ada solusi yang komprehensif dalam penanganan sampah sehingga bisa benar-benar musnah atau dimanfaatkan kembali dengan mekanisme daur ulang. Ketika sudah sangat darurat, maka upaya terakhirnya adalah buka tutup TPA Piyungan yang tentunya hal itu bukan merupakan solusi jangka panjang.

Pertanyaannya kemudian, lantas bagaimana kita bisa merdeka dari sampah? Atau apakah mungkin merdeka dari sampah? Ya, pastinya bisa dan sangat mungkin untuk merdeka dari sampah, dengan catatan perlunya keterlibatan semua pemangku kepentingan yang ada, baik dari sisi pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta, baik dari sisi regulator, produsen sampah maupun pengelola sampah. Tentunya sampah harus dikelola mulai dari hulu hingga ke hilirnya. Rumah, kantor, dan pabrik sebagai penghasil sampah harus sudah memiliki kesadaran akan permasalahan sampah ini.

Mochamad Syamsiro

Pemilahan di hulu ini menjadi kunci penting tata kelola sampah. Barang yang masih bisa dimanfaatkan atau didaur-ulang kemudian dipisah dan bisa disetorkan melalui bank sampah yang selama ini sudah banyak bermunculan. Di sisi regulator pemerintah, harus ada aturan dan sanksi khususnya terkait pengelolaan sampah yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian perlu ada insentif khusus terkait pengelolaan bank sampah. Tidak bisa kemudian menjadikan



KR-JOKO SANTOSO

bank sampah sebagai lembaga mandiri secara ekonomi, karena pada dasarnya bank sampah digerakkan secara sosial dari orang-orang yang peduli lingkungan. Insentif bisa diwujudkan dan dihitung berdasarkan berapa banyak sampah yang dikelola dan diolah sesuai kemampuan masing-masing pemda. Saya yakin semua pemda mampu melaksanakan ini, tinggal bagaimana keberpihakannya pada persoalan sampah.

Berikutnya adalah bagaimana pemda memfasilitasi sampah yang sudah terkumpul di bank sampah, misalnya dengan mempertemukannya dengan pihak ketiga (swasta) pengolah sampah yang sudah ada. Banyaknya bank

sampah tidak mungkin kemudian hal tersebut dikelola secara manual, perlu ada aplikasi khusus yang digunakan untuk mendata & memonitor timbunan sampah di bank sampah. Beberapa lembaga sudah mengembangkannya, namun jika pemda ingin mengembangkannya sendiri secara mandiri, tentunya akan jauh lebih baik karena bisa mengontrol seluruh pergerakan sampah yang ada di wilayah tersebut. Pemda bisa bekerjasama dengan universitas untuk pengembangan aplikasi pendataan dan monitoring sampah.

Yang terakhir dan ini sangat penting adalah penanganan di sisi hilir. Bagaimanapun juga, apa yang sudah dilakukan di atas, tetap akan menyisakan residu sampah yang tidak bisa diolah dan diapa-apakan lagi. Maka mau tidak mau harus dibuang ke TPA. Agar kondisi TPA tidak mengungung, perlu ada teknologi pemusnah sampah skala besar yang bisa mengurangi sampah secara signifikan. Dari sekian banyak teknologi termal seperti insinerator dan gasifikasi menjadi yang terbaik karena prosesnya cepat dan hanya meninggalkan sekitar 10-25 persen residu abu/arang.

Semoga upaya penanganan sampah di wilayah Yogya khususnya bisa segera terwujud mengingat citra sebagai kota pariwisata harus tetap dijaga dan kebersihan menjadi faktor utama untuk mempertahankan predikat tersebut. **J-d**

**) Dr Eng Mochamad Syamsiro, Dosen Fakultas Teknik Universitas Janabadra dan Dekan Fakultas Teknologi Informasi UNU Yogyakarta.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 500 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005